

**PERANAN PERKEBUNAN NEGARA DALAM PENYERAPAN
TENAGA KERJA DI DAERAH TINGKAT I
SULAWESI SELATAN**



OLEH

SYAMSUDDIN

STB/NIRM : 4588010094 / 8811311171

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PENGEMBANGAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS "45"
UJUNG PANDANG**

1995

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERANAN PERKEBUNAN NEGARA DALAM
PENYERAPAN TENAGA KERJA DI DAERAH
TINGKAT I SULAWESI SELATAN

Nama Mahasiswa : S Y A M S U D D I N

No.Stb/Nirm : 4588010094/8811311171

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Program Studi : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

(Drs. H. Amirullah EM, MSc)

(Syamsuddin, SE)

Mengetahui dan Mengesahkan

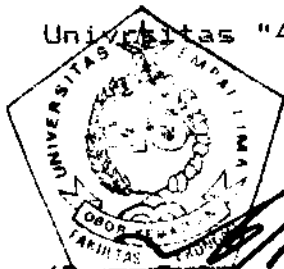
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Pada Universitas "45" Ujung Pandang

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi

Universitas "45"

dan Studi Pembangunan



(Drs. Faizada Falisuri)

(Rafiuddin, SE)

Tanggal Pengesahan : _____

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari/Tanggal : Senin 30 Januari 1995

Skripsi atas nama : SYAMSUDDIN

Nomor STB / NIRM : 4588010094 / 8811311171

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas "45" Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Studi Pembangunan.

Panitia Ujian

Pengawas Umum :

1. DR. Andi Jaya Sose, SE, MBA
(Rektor Universitas "45")

(.....)

2. Prof. Dr. H.A. Karim Saleh
(Dekan Fak. Ekonomi Unhas)

(.....)

Ketua : Drs. Palipada Palisuri
(Dekan Fak. Ekonomi Univ "45")

(.....)

Sekretaris : Sukmawati, SE

(.....)

Penguji : 1. Drs. H. Suudi Sa'na, MS

(.....)

2. Drs. A. Kahar Akil, MS

(.....)

3. Ramli Manrapi, SE, MSc

(.....)

4. Drs. Palipada Palisuri

(.....)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayanya jualah sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, guna memenuhi sebagian syarat untuk menyelesaikan studi penulis pada Fakultas Ekonomi Universitas "45" Ujung Pandang.

Sehubungan dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya khususnya kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak/Ibu ketua jurusan dan segenap Dosen yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan studi .
2. Bapak Pembimbing Drs. H. Amirullah, BM, MSc dan Bapak Syamsuddin. SE selaku pembimbing satu dan dua dengan tekun membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak kepala kantor Departemen Pertanian, Bapak kepala kantor Departemen Tenaga Kerja, serta kepala kantor Biro Pusat Statistik Propensi Sulawesi Selatan, serta instansi lainnya yang terkait dalam penulisan skripsi ini yang telah membantu penulis dalam memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengadakan penelitian.
4. Semba sujud, kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis, serta seluruh teman-teman yang memberikan dorongan baik moril maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Akhirnya penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat, walaupun diakui bahwa skripsi ini masih jauh dari standar penulisan karya ilmiah dan dengan lapang dada penulis menerima segala kritikan-kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Ujung Pandang, Januari 1995

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan	4
1.3.1. Tujuan	4
1.3.2. Kegunaan	5
BAB II. KERANGKA TEORI	6
2.1. Pertanian Indonesia	6
2.2. Pengertian Produksi dan Faktor Produksi	12
2.3. Perkebunan Negara	20
2.4. Kesempatan Kerja	26
2.5. Penyerapan Tenaga Kerja	34
BAB III. METODOLOGI	37
3.1. Daerah Penelitian	37
3.2. Sumber dan Cara Pengumpulan Data	37

3.3. Peralatan dan Metode Analisis	38
3.4. Kerangka Operasional	39
BAB IV. PERANAN PERKEBUNAN NEGARA DALAM PENYERA-	
PAN TENAGA KERJA	41
4.1. Perkembangan Perkebunan Negara ...	41
4.2. Produksi Perkebunan Negara di	
Sulawesi Selatan	46
4.3. Langkah-langkah Dalam meningkatkan	
Produksi Perkebunan Negara	52
4.4. Perkembangan Angkatan Kerja di	
Sulawesi Selatan	54
4.5. Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor	
Perkebunan Negara	59
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1. Kesimpulan	68
5.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1. GAMBARAN PERKEBUNAN NEGARA DI INDONESIA TAHUN 1990	43
TABEL 2. LUAS AREAL DAN PRODUKSI PERKEBUNAN NEGARA KELAPA SAWIT (PTP XVIII) SULAWESI SELATAN 1989 - 1993	46
TABEL 3. LUAS AREAL DAN PRODUKSI PERKEBUNAN NEGARA TANAMAN TEBU (PTP XXIV) SULAWESI SELATAN 1989- 1993	47
TABEL 4. LUAS AREAL PERKEBUNAN NEGARA TANAMAN KELAPA HIBRIDA (PTP VI) SULAWESI SELATAN 1989 - 1993	49
TABEL 5. PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA SULAWESI SELATAN TAHUN 1989 - 1993	54
TABEL 6. PERKEMBANGAN KESEMPATAN KERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN (PERSEN)	55
TABEL 7. JUMLAH TENAGA KERJA YANG TERHADAP PADA PERKEBUNAN NEGARA DI DAERAH SULAWESI SELATAN TAHUN 1989 - 1993	62

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
GRAFIK I. HUBUNGAN TINGKAT UPAH DAN TENAGA KERJA	30
GRAFIK II. HUBUNGAN UPAH TENAGA KERJA DAN OUTPUT	32
GRAFIK III. HUBUNGAN UPAH DAN PENGANGGURAN (PHILLIPS CURVE)	33

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penduduk Indonesia cukup besar sedang tingkat hidupnya masih relatif rendah, dilain pihak kekayaan sumber daya alam menunjukkan potensi yang menggembirakan untuk meningkat taraf hidup seluruh masyarakat Indonesia.

Jumlah penduduk yang besar mencerminkan dua hal pertama jumlah penduduk yang besar menggambarkan kebutuhan masyarakat yang besar, seperti kebutuhan pangan, sedang perumahan, energi dan kesempatan kerja kedua jumlah penduduk yang besar mencerminkan potensi yang dapat dikerahkan untuk mengolah sumber-sumber alam yang tersedia untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

Jumlah penduduk Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, begitu juga tenaga kerja mengalami kenaikan, maka ini perlu mencari lapangan kerja, salah satu usaha pemerintah dalam mengatasi hal tersebut di atas adalah melaksanakan pembangunan di sektor pertanian khususnya sektor perkebunan.

Perkebunan merupakan usaha dari sektor pertanian yang banyak menyerap tenaga kerja dalam pelita V pemerintah berusaha untuk meningkatkan produksi perkebunan agar

lebih tinggi lagi, dalam suasana resesi dunia, langkah ini tepat sekali.

Banyak usaha telah dilakukan oleh pemerintah seperti perluasan tanaman baru, rehabilitasi kebun yang sudah tua baik lewat perseroan terbatas perkebunan (PTP) Perkebunan Inti Rakyat (PIR), Proyek rehabilitasi dan perluasan Tanaman Ekspor (PRPTE), maupun small Holder Rubber Development Project (SDRP) dengan penggunaan varietas unggul, teknik agronomi mutakhir, perlindungan tanaman terpadu serta sistem pengelolaan yang moderen.

Peningkatan produksi perkebunan disamping untuk meningkatkan perluasan lapangan pekerjaan dan meningkatkan penghasilan rakyat, juga bertujuan untuk menunjang pembangunan Industri serta meningkatkan ekspor.

Perkebunan negara merupakan salah satu jalan utama bagi perluasan kesempatan kerja baru dalam memberi ruang hidup bagi penduduk yang senang tiasa terus bertambah. Keberhasilan sektor pertanian khususnya sektor perkebunan rakyat sangat dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor antara lain : Tersedianya lahan untuk perkebunan, tersedianya dana yang memadai prasarana lainnya yang cukup.

Di bidang ekonomi, sasaran pokok yang akan dicapai dalam pembangunan jangka panjang adalah terciptanya keser-

imbangan antara sektor pertanian dan sektor industri. dengan memperhatikan sasaran pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi, maka pembangunan sektor perkebunan menjadi sangat penting, pembangunan sektor pertanian khususnya bidang perkebunan bukan saja berarti dipercepat atau ditingkatkan terciptanya struktur ekonomi yang seimbang, yang pelaksanaannya harus pula memperluas kesempatan kerja, meningkatkan rangkaian proses produksi perkebunan Negara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan juga dapat diekspor untuk menghasilkan devisa.

Berkaitan hal tersebut di atas, maka dengan keberadaan perkebunan negara dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, dengan demikian masalah perluasan kesempatan kerja dapat terus ditingkatkan. Dalam hal ini upaya apapun yang dilakukan dalam kegiatan pembangunan tidak terlepas dari tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti, tentang Peranan Perkebunan Negara Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Tingkat I Sulawesi selatan.

1.2 Pokok Permasalahn

Berdasarkan latar belakang telah dikemukakan sebelumnya maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah Berapa besar peranan perkebunan negara terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan.

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan

1. Untuk mengetahui perkembangan perkebunan negara yang ada di Sulawesi Selatan
2. Untuk mengetahui besarnya tenaga kerja yang dapat terserap tiap tahun pada sektor perkebunan di Sulawesi Selatan.

1.3.2 Kegunaan

1. Dapat diharapkan agar analisa data yang diperoleh memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan pihak-pihak lainnya dalam hubungannya dengan usaha meningkatkan perkebunan yang dapat menyerap tenaga kerja yang besar.
2. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berminat untuk mengetahui dan mempelajari lebih jauh tentang perkebunan dalam hubungannya penyerapan tenaga kerja.

1.4 Hipotesis

Sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang telah dikemukakan maka yang menjadi hipotesis dalam penulisan ini adalah diduga bahwa dengan adanya perkembangan negara di Sulawesi Selatan, maka dapat menyerap tenaga kerja yang relatif tinggi dari tahun ke tahun.

II. KERANGKA TEORI

2.1 Pertanian Indonesia

Pada tingkat persulaan manusia hidup secara mengembara kian kemari makan. Ia hidup dari pemberian alam yang berupa daun-daun, buah-buahan, umbi-umbian, dan lain-lain yang tumbuh liar di hutan-hutan dan dipadang rumput.

Usaha tani pada tingkat tersebut masih sangat sederhana bentuk corak dan pola pengelolannya dipergunakan adalah dipilih, pengolahan tanah dipekerjakan dengan tuгал atau alat semacam cangkul (pacul).

Pertanian sebagai sumber kehidupan manusia merupakan lapangan kerja dari ilmu pertanian sudah selayaknya kalau kita lebih dahulu ingin mengetahui yang dimaksud dengan pertanian itu, bahwa lazimnya yang dimaksud dengan pertanian itu tak lain dari pada bercocok tanam. Memang demikian pertanian dalam percakapan sehari-hari, arti sehari-hari itu sering disebut dengan nama pertanian dalam arti itu sering disebut dengan nama pertanian dalam arti sempit arti ilmiah dari istilah pertanian lebih luas daripada pengertian sehari-hari ia meliputi bidang-bidang seperti bercocok tanam (pertanian dalam arti sempit), perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengolahan hasil bumi dan pula pemasaran hasil bumi berdasarkan atas pengertian tersebut.

Tanda-tanda atau batasan-batasan apakah yang dipergunakan oleh ilmu pertanian untuk menentukan apakah suatu sumber kehidupan itu masuk dalam bidang pertanian batasan yang dapat kita pergunakan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dalam proses produksi itu harus terbentuk bahan-bahan organik yang berasal dari zat-zat organik dengan bantuan tumbuh-tumbuhan atau hewan seperti tumbuh-tumbuhan, ternak, ikan, ulat sutera, laba-laba dan sebagainya.
2. Adanya usaha manusia untuk memperbaharui proses produksi yang bersifat reproduktif atau usaha pelestarian

Kedua syarat itu harus dipenuhi, jika hanya satu dari dua syarat itu yang terpenuhi, maka usaha produksi itu belum dapat digolongkan menjadi pertanian contoh: pengumpulan bahan-bahan makanan seperti, umbi-umbian, daun-daunan, buah-buahan, ikan dan hewan dari hutan-hutan, padang rumput, sungai, rawa, dan sebagainya oleh suku-suku yang masih hidup mengembara belum dapat dianggap sebagai usaha pertanian karena usaha produktif belum dilakukan. Usaha tersebut lazim dinamakan "usaha pengumpulan".

Sebaliknya penangkapan ikan dari laut, sungai rawa, telaga, empang, tambak-tambak yang dibarengi dengan penjagaan kelestarian hidup dari hewan-hewan tersebut dapat digolongkan dalam pertanian dalam arti luas.

Produk yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan dan hewan itu tidak selalu dapat langsung dipergunakan atau makan oleh manusia, umumnya ia perlu dicelah lebih dahulu. Pengolahan hasil pertanian, lebih-lebih kalau pengolahan itu masih merupakan satu mata rantai dari ikatan organik dengan pertanian pada umumnya masih digolongkan dalam pertanian.

Pertanian dalam arti yang luas terdiri atas rantai yang panjang dan lagi pula bercabang-cabang dan mata rantai yang menyusun rantai itu memiliki ikatan/kaitan yang organik sifatnya.

Pengetahuan atas aspek-aspek dari rangkaian rantai tersebut, baik aspek-aspek teknik-biologienya maupun aspek-aspek non teknik biologienya, sesungguhnya baru merupakan pengetahuan atas satu bila atau satu sisi dari pertanian. Guna memahami masalah-masalah yang ada dalam usaha tani sebagai satu kesatuan organik masih diperlukan juga pengetahuan perihal "the man behind the gun" artinya, memiliki pengetahuan atas petani, keluarganya dan masyarakatnya pengetahuan inilah yang merupakan sisi balik dari usahatani.

Pengertian pertanian yang dikemukakan oleh A.T. Mosher (1981 : 19) sebagai berikut :

"Pertanian adalah sejenis proses produksi yang khas didasarkan atas proses pertumbuhan tanaman dan

hewan. Para petani mengatur dan menggiatkan pertumbuhan tanaman dan hewan itu dalam usaha taninya (farm) kekayaan produksi di dalam setiap usaha tani merupakan suatu kegiatan usaha (business) dimana biaya dan penerimaan merupakan aspek penting".

Pertanian rakyat atau pertanian dalam arti sempit meliputi: perkebunan rakyat, perikanan rakyat, dan pencarian hasil hutan pada umumnya diusahakan dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan kehidupan (subsistem) petani dan keluarganya secara ekonomis, hasil-hasil pertanian rakyat sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan faktor-faktor produksi yang dipergunakan sebagian besar bersumber dari dalam usaha tani itu sendiri.

Perusahaan pertanian merupakan perusahaan pertanian untuk memproduksi hasil tertentu dengan sistem pertanian seragam dan manjer terpusat dengan mempergunakan metode-metode ilmiah dan teknik pengolahan yang efisien.

Secara teknis, pertanian adalah mengusahakan flora dan fauna (tumbuh-tumbuhan dan hewan) melalui produksi. dengan flora berarti semua tumbuh-tumbuhan mulai dari tingkat rendah sampai dengan tingkat tinggi, sedangkan fauna adalah binatang, baik yang dipelihara sebagai ternak atau hewan atau ikan, maupun yang tidak dipelihara.

Menurut Bandewidjojo (1983 : 19) mengenai pengertian pertanian :

"Pertanian dalam arti luas meliputi semua kegiatan usaha dalam memproduksi flora dan fauna tersebut yang dibedakan ke dalam lima sektor masing-masing pertanian rakyat perkebunan, peternakan, perikanan dalam arti sempit, khusus ditujukan terhadap pertanian rakyat.

Dari pengertian pertanian di atas, dapat dikatakan bahwa usaha tani meliputi lima sara produksi, yaitu tenaga kerja (petani), tanah garapan, hewan tanaman, perkakas, dan sarana produksi lainnya, seperti pupuk dan obat-obatan modal dan manajemen pertanian.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menjelaskan tentang pembangunan pertanian sebagai prioritas utama dalam rangka mewujudkan sektor ekonomi yang seimbang antara pertanian dan industri yaitu:

"Pembangunan pertanian yang mencakup pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan, perikanan peternakan serta kehutanan diarahkan pada berkembangnya pertanian yang maju, efisien, dan tangguh. Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, peternakan dan nelayan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menunjang pembangunan Industri serta, meningkatkan ekspor".

Dengan demikian, jelas bagi kita bahwa upaya pembangunan sektor pertanian merupakan prioritas utama dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat lima unsur utama yang hendak dicapai dalam pembangunan pertanian, yaitu :

1. Meningkatkan produksi pangan agar dapat berswasembada tidak tergantung lagi pada impor bahan pangan
2. peningkatan produksi pangan untuk memperbaiki tingkat taraf hidup dan atau pendapatan para petani.
3. Peningkatan produksi tanaman terutama yang merupakan komoditi ekspor, guna peningkatan devisa yang sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan selanjutnya.
4. Peningkatan produksi tanaman dengan maksud agar dapat menarik atau menyerap tenaga kerja yang tersedia
5. Pebukaan areal-areal pertanian di daerah yang penduduknya masih kurang. Jadi disamping Intensifikasi, juga dilaksanakan usaha-usaha diversifikasi dan rehabilitasi.

Dua hal yang perlu dikemukakan dalam hubungannya dengan pertanian luas & moderen⁰, yaitu estate dan family farm.

Estate merupakan proyek pertanian yang umumnya berbentuk perusahaan/Perseroan terbatas (PT) atau Limited (Ltd) dimana didalam organisasinya dibedakan antara staf pimpinan dan para pelaksana atau para pekerja staf pimpi-

nan mengelola dan bertanggung jawab terhadap bagian-bagian tertentu dalam kerangka organisasi perusahaan seperti : bagian penyediaan sarana, bagian produksi bagian penjualan dalam negeri dan luar negeri, bagian administarsi dan bagian keuangan, sedangkan pelaksanaan terdiri dari para pekerja yang membantu kalau cara pelaksanaan tugas-tugas pada masing-masing bagian tersebut dimana yang terbanyak adalah pekerja dibidang produksi/ tanaman, mereka terdiri dari tenaga-tenaga lepas yang mendapat upah.

Family farm, merupakan proyek pertanian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok keluarga, dimana pucuk pimpinan dalam mengelola proyek adalah dari anggota keluarga. Bila proyek pertanian begitu besar, maka dapat mengerjakan pekerjaan kasar dibantu oleh beberapa tenaga upahan, para pemilik atau modal berasal dari kalangan keluarga.

2.2 Pengertian Produksi dan Faktor Produksi

Beberapa penulis memberikan batasan tentang produksi yaitu menurut Bishop dan Tonsaini (1995 : 29) sebagai berikut :

"Production is a process where by some goods and services called input a transformed into other goods and services called output".

Pengertian produksi diatas merupakan suatu proses perubahan barang-barang dan jasa-jasa yang mempunyai nilai yang disebut dan penghasilan barang-barang dan jasa yang mempunyai nilai yang disebut output.

Produksi dalam arti ekonomi berarti menciptakan barang yang mempunyai kegunaan dengan mengadakan perubahan dalam bentuk menyediakannya ditempat yang diperlukan dan dilaksanakan pada waktu yang tepat.

Menurut Albert L. Mayer (1935 : 28) bahwa tujuan daripada produksi adalah :

"Bertujuan sebagai pertukaran. Bahwa alasan satu-satunya kita menginginkan barang-barang atau jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia".

Dengan adanya transaksi pertukaran barang-barang bagi manusia dalam kehidupan, berarti kebutuhan manusia terpenuhi dan setiap aktivitas yang menambah kepuasan manusia haruslah dipandang produktif. Sebelum memproduksi suatu barang, maka haruslah diperkirkan lebih dahulu apakah barang tersebut berguna dan memberikan bagi kehidupan manusia. Bergunanya barang tersebut, ditentukan oleh barang itu sendiri apakah menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan manusia.

Seandainya barang-barang yang diproduksi itu tidak berguna bagi kehidupan manusia, berarti pemborosan faktor-faktor produksi semata-mata.

Produksi menurut Sumitro Djoyohadiku Sumo (1985 : 39) sebagai berikut :

"Proses mempergunakan unsur-unsur produksi dengan maksud menciptakan faedah untuk memenuhi kebutuhan manusia".

Dengan rumusan tersebut, jelaslah bahwa untuk menghasilkan suatu barang, maka dipergunakan lebih dari satu faktor produksi, yaitu antara lain : tanah, modal, tenaga kerja dan teknologi, faktor-faktor produksi tersebut dikombinasikan dalam batas-batas tertentu dalam setiap proses produksi.

Suatu kenyataan ekonomi yang dihadapi dewasa ini adalah bagaimana petani dapat mengkombinasikan faktor-faktor produksi tersebut, agar tercapai efisiensi secara fisik dan ekonomis.

Untuk menghasilkan suatu output, digunakan faktor-faktor produksi seperti tanah untuk perkebunan, modal untuk membeli bibit, pupuk, obat-obatan, dan sarana lainnya, termasuk traktor, truck, selain itu juga tenaga kerja untuk mengolah tanah, memupuk tanaman, memberantas hama penyakit dan pemanen setiap pekerjaan itu memerlukan tenaga yang terampil.

Menurut I.R. Tiken (1971 : 62) sebagai berikut :

"Jumlah produksi yang dihasilkan tergantung dari kuantitas dan kualitas faktor-faktor produksi yang digunakan".

Di dalam memproduksi sesuatu barang harus diperhatikan kualitas dan kuantitas faktor-faktor produksi yang mana penggunaannya sesuai dengan kebutuhan untuk mencegah terjadinya pemborosan.

Dalam memproduksi sesuatu barang, kalau kualitas produksi tinggi dan terdapat dalam jumlah yang sesuai maka memberikan jumlah produksi yang tinggi pula.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai faktor-faktor yang dipergunakan dalam suatu proses produksi antara lain :

1. Tanah

Tanah merupakan faktor produksi yang sangat penting, sebab tanpa tanah yang subur maka tanaman perkebunan dapat mengalami kelerdilan dalam pertumbuhannya. Dalam hal ini, dapat dikemukakan oleh Mubyarto (1983 : 10) sebagai berikut :

"Tanah sebagai salah satu faktor produksi adalah merupakan pabriknya hasil-hasil pertanian yaitu tempat dimana hasil produksi keluar".

Menurut pendapat di atas jelas disebutkan fungsi tanah sebagai faktor produksi dalam bidang pertanian. Tanah merupakan lokasi mengadakan aktivitas proses produksi, oleh karena itu aktivitas produksi tidak dapat berjalan tanpa tanah walaupun modal dan tenaga kerja cukup tersedia dalam jumlah yang memadai.

Seorang petani yang ingin menanam tentu memerlukan areal tanah untuk bertanam dan setelah tanah itu tersedia maka persyaratan jenis tanah juga senang tiasa mendapat perhatian karena usaha perkebunan secara ekstensifikasi mengalami hambatan yang perluasan areal lahan perusahaan dapat menelan dana yang tidak sedikit mengenai hal ini oleh Kuntjoro (1935 : 23) dikemukakan bahwa :

"Pada ekstensifikasi menggunakan lebih besar investasi dana dan merupakan usaha jangka panjang. Sedangkan Intensifikasi meningkatkan produktivitas sumber daya produksi yang tersedia dan merupakan usaha pencapaian tujuan efektif dalam jangka pendek.

Berdasarkan informasi tersebut, maka perlu mendapat perhatian terhadap usaha intensifikasi usaha tani yang dilaksanakan oleh rakyat (petani pemilik lahan) yaitu dengan cara intensifikasi atau dengan kata lain perlu penerapan Program TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) di Sulawesi Selatan. Kalau program TRI diperlukan di samping perkebunan sendiri, maka selain kebutuhan bahan baku tebu bagi pabrik terjamin, juga para petani dapat menikmati pendapatan dari usaha tani tebu yang berarti pula bahwa selain petani sebagai butuh pada perusahaan perkebunan juga petani sebagai pengelola usaha taninya sendiri yang berpartisipasi dalam pergaulan di Sulawesi selatan.

2. Tenaga Kerja

Faktor tenaga kerja merupakan input yang sangat penting bagi suatu perusahaan/kegiatan dalam melaksanakan proses produksi. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang tidak kurang pentingnya dalam usaha produksi, dalam hal tersebut maka produktivitas tenaga kerja perlu diperhatikan. Produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan dengan berbagai cara diantaranya bimbingan, pendidikan dan latihan demi untuk meningkatkan mutu dan hasil kerjanya.

Adapun hal yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya produktivitas tenaga kerja yaitu umur (usia) tenaga kerja itu sendiri sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sumitro Djoyohadikusumo (1985 : 38).

"Penduduk dibawah usia kerja artinya dibawah 15 tahun, golongan antara 15 sampai 64 tahun termasuk angkatan kerja dan golongan yang melebihi umur kerja di atas 65 tahun".

Menurut pembatagian umur diatas, diduga masih terdapat didalam golongan angkatan kerja 9 Golongan umur 15 sampai 64 tahun yang tidak/belum bekerja, malahan yang sudah bekerja diduga diantaranya terdapat yang produktivitas kerjanya masih relatif rendah.

Dalam usaha pertanaman tebu, tenaga manusia memegang peranan sangat penting yaitu dalam hal : Pemibitan,

Penggalian lobang, Penanaman, penebangan dan lain-lain, dimana dengan menggunakan tenaga manusia maka pekerjaan tersebut lebih produktif dibanding dengan menggunakan peralatan-peralatan yang serba mekanis. dan begitu pula pertimbangan yang lain sehingga mekanisasi dibatasi penggunaannya, yaitu agar tenaga kerja yang ada dapat memperoleh kesempatan kerja didalam usaha pertanaman tersebut.

Menurut pendapat Sumitro Djoyhadikusumo (1995 : 160)

"Produk dapat ditingkatkan dengan memakai tenaga lebih banyak atau dengan menambah jam kerja".

Dengan pengertian ini dimaksudkan bahwa penambahan tenaga kerja produksi dapat meningkat atau menambah jam kerja bagi tenaga kerja, maka produksi juga dapat meningkat. Pendapat di atas harus disesuaikan dengan kombinasi antara volume pekerjaan dan tenaga kerja tersedia. Jika menambah tenaga kerja seangkan volume pekerjaan tetap maka dapat menimbulkan pengangguran, penambahan tenaga kerja dapat menguntungkan jika volume pekerjaan ditambah sehingga menghasilkan kombinasi yang seimbang antara volume pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja pada kegiatan usaha yang bersangkutan.

3. M o d a l

Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1985 : 33) yang dimaksud dengan modal yaitu :

"Semua barang-barang yang dihasilkan dan yang dipergunakan dalam produksi untuk masa depan".

Dari pengertian ini, jelas bahwa barang-barang itu kadang-kadang disebut barang produksi, juga kadang-kadang disebut barang investasi ataupun barang-barang modal. Barang-barang produksi dikategorikan sebagai modal sebab sesuatu produksi yang dihasilkan oleh seorang petani, dari hasil penjualannya diinvestasikan kedalam proses produksi.

Selain itu pendapatannya Mubyarto (1983 : 94) dalam pengertian ekonomi, modal adalah :

"Barang atau uang yang bersama-sama faktor-faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru yaitu dalam hal ini adalah hasil pertanian".

Modal merupakan suatu yang sangat penting untuk kemampuan produksi selanjutnya sesuatu masyarakat/bangsa atau negara.

Pengertian modal di sini yaitu barang atau apapun yang dipergunakan untuk mencapai sesuatu tujuan.

4. Skill/Tenaga Kerja

Skill merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam proses produksi, sebab tanpa adanya keahlian seseorang dalam melaksanakan proses produksi dapat menyebabkan produksi yang dihasilkan tidak dengan apa yang diharapkan.

Dalam hal ini, tenaga kerja yang mempunyai keahlian tertentu (skilled Labour), Dr. Winardi (1971 : 413).

"Pekerjaan yang membutuhkan latihan-latihan tertentu, atau pendidikan tertentu sebelum seorang dapat melaksanakannya dengan baik".

Jika tenaga skill tidak dapat lajur dengan sendirinya tanpa adanya latihan-latihan dan Pendidikan, sebab keahlian tersebut bukan bahwa sejak lahir. Dengan demikian betapa besar peranannya tenaga skill dalam proses produksi walaupun tersedia modal, alam, tenaga yang cukup namun belum dapat membrikan produksi yang cukup tanpa skill.

2.3 Perkebunan Negara

Perkebunan tidak hanya dikenal di Indonesia tetapi di banyak negara lain. Namun begitu pada umumnya perkebunan ini didapatkan di daerah-daerah bermusim panas didekat katulistiwa dan kafena menggunakan sistem manajemen seperti pada perusahaan industri dengan memanfaatkan hasil

hasil penelitian dari teknologi terbaru maka sering pula disebut "Industri perkebunan" atau Industri pertanian.

Perkebunan di Indonesia meliputi luas berkisar 2.225.645 hektar pada tahun 1983 dimana sebagian besar ada milik negara. Perkebunan-perkebunan milik ini terutama merupakan perkebunan-perkebunan bekas modal Belanda yang telah dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Dengan demikian perkebunan negara merupakan suatu perkebunan yang diusahakan atau dikelola oleh pemerintah dengan menggunakan tenaga kerja Indonesia.

Perkebunan tersebut dikelola pemerintah karena memerlukan modal yang sangat besar yang mana untuk masyarakat agak sulit untuk mengelolanya apalagi dalam perkebunan besar, karena keterbatasan modal.

Salah satu perubahan yang lebih penting daripada variasi daerah ladang, ialah perubahan tanaman perdagangan. Kebun bertanam campuran merupakan salah satu tipenya. Kebun bertanam campuran di Jawa diduga telah berkembang di Jawa Tengah sebelum abad ke-10. Kebun semacam juga berkembang di Sumatera dan Sulawesi selatan pada masa yang tua pula, di samping di daerah Nusa Tenggara. Sebaliknya, berbeda dengan kebun campuran yang lebih ditujukan untuk tujuan subsisten, sejumlah daerah di luar Jawa pada masa sebelum abad ke-19, telah mengembangkan kebun tanaman perdagangan (*gardens of commercial crops*),

misalnya, yaitu kopi, lada, kapur barus, dan rempah-rempah.

Pertumbuhan kebun produksi tanaman hutan komersial terjadi ketika perdagangan internasional berkembang di Asia Tenggara dan kepulauan Indonesia, yang menempatkan orang-orang Indonesia, India, dan Cina menjadi pedagang terkemuka di daerah kawasan Asia Tenggara. aktivitas perdagangan internasional di Asia Tenggara yang menghubungkan perdagangan di Asia Timur (Cina), dan Asia bagian Barat dan Eropa, pada abad ke-15 meningkat pesat sebagai akibat meningkatnya permintaan komoditi rempah-rempah di pasaran internasional di Eropa, di antaranya, yang ikut mendorong peningkatan pembudayaan kebun-kebun rempah-rempah di daerah Maluku, dan daerah lain.

Proses komersialisasi di daerah Indonesia sendiri diawali dari proses pertumbuhan hubungan simbiotik antar-daerah. Hubungan simbiotik, yang diwujudkan dalam bentuk hubungan perdagangan, antara lain terjadi hubungan simbiotik antara daerah persawahan penghasil padi dan daerah ladang penghasil tanaman perdagangan, dan antara daerah kepulauan satu dengan daerah kepulauan yang lain. Sebagai contoh, Maluku dan Jawa, di satu pihak, dan Jawa dengan daerah lain, telah lama memiliki hubungan simbiotik dalam bentuk perdagangan. Maluku yang telah lama berhubungan dengan perdagangan rempah-rempah, tidak memiliki ladang

padi, karena itu mengembangkan perdagangan timbal balik dengan Jawa dan Sulawesi Selatan. Mereka memasukkan rempah-rempah ke daerah langganannya di daerah bagian barat, dan memperoleh beras dari Jawa dan Sulawesi Selatan. Sebaliknya, Jawa sebagai produsen beras, tidak memiliki kebun rempah-rempah atau komoditi kebun lainnya, mengembangkan hubungan perdagangan dengan daerah kepulauan lain, selain dengan Maluku, juga dengan daerah Nusa Tenggara, Kalimantan, dan daerah Indonesia bagian barat, dengan menggunakan komoditi perdagangan dari kedua belah pihak, seperti berikut :

Selain meningkatnya pertumbuhan kebun komoditi komersial, meningkatnya proses komersialisasi di daerah pantai pada abad ke-16, juga mendorong pertumbuhan kelahiran kerajaan-kerajaan Islam, dan pertumbuhan kota-kota emporium di sepanjang pantai Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Pertumbuhan kerajaan dan kota-kota emporium baru ini, sekaligus diikuti dengan kemunduran kerajaan Majapahit dan kota-kota emporiumnya, yang berperan dalam perdagangan maritim periode sebelumnya. Perkembangan ini juga diikuti oleh proses Islamisasi dan penyebaran kebudayaan Melayu di kepulauan Nusantara.

Berbeda dengan di Jawa, kerajaan-kerajaan lain di Maluku (ternate dan Tidore), mengandalkan surplus tanaman kebun, yaitu bahan rempah-rempah, dari pedesaan yang ada

di bawah kekuasaannya, karena mereka tidak memiliki basis persawahan seperti yang dimiliki kerajaan Jawa. Beberapa kerajaan lainnya, juga memiliki basis surplus komoditi perdagangan dari daerah pedesaannya, di samping memiliki sumber pendapatan lain dari kegiatan perdagangan di kota bandar emporiumnya, seperti Ujung Pandang.

Perekonomian dan perdagangan di Indonesia dan Eropa sebelum revolusi industri, pada hakikatnya mirip keterlibatan Indonesia dalam kegiatan perdagangan dan pelayaran tidak beda dengan Eropa pada abad ke-15. Akan tetapi mengapa kegiatan perdagangan dan masyarakat Indonesia tidak meningkatkan kemajuan perkembangan ekonomi seperti yang dicapai oleh Eropa? Mengenai ini perlu dilihat dari beberapa segi perbedaannya yang mendasarinya, seperti struktur geografis wilayah perdagangannya, struktur sosial, dan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang melatarbelakangi perlebangan selanjutnya, terutama perkembangan kapitalisme dan kolonialisme.

Struktur geografi kepulauan Indonesia yang luas, menyebabkan jarak pengangkutan perdagangan menjadi besar, sehingga menuntut risiko modal yang besar pula. Akibat tidak semua golongan mampu partisipasi dalam kegiatan perdagangan dalam skala nasional dan internasional. Mereka yang mampu adalah golongan raja dan bangsawan, sehingga golongan merekalah yang banyak partisipasi dalam

perdagangan, hal yang berbeda dengan yang terjadi di Eropa. Selain itu golongan pedagang di Indonesia memiliki peranan yang berbeda dengan rekanannya yang ada di Eropa. Perbedaan yang lebih penting lagi, sehingga perdagangan di Indonesia sangat lemah, terutama dalam menghadapi persaingan dengan luar. Perbedaan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang mendasari revolusi di Eropa, tidak dijumpai di Indonesia. Akibatnya, kegiatan perdagangan dan ekonomi di Indonesia sangat lambat dan statis selama beberapa periode.

Kehadiran bangsa Eropa di Indonesia, telah menyebabkan bertambahnya permintaan akan produksi Indonesia secara cepat, meningkatnya harga, mempertajam konflik politik dan ekonomi, meluasnya kapitalisme politik Eropa, dan timbulnya perimbangan-perimbangan baru dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat dan curiga di kalangan penduduk Indonesia. Persaingan dan pertentangan yang timbul di antara orang-orang Eropa dalam mempercepatkan perdagangan, di satu pihak, dan pertentangan antara orang-orang Eropa dan penduduk Indonesia, di lain pihak, telah membawa keputusan kehidupan perdagangan di Indonesia. Dalam kekusutan perdagangan semacam itu, maka kekuasaan militerlah yang menjadi faktor penentu.

2.4 Kesempatan Kerja

Sebelum menguraikan mengenai kesempatan kerja, maka terlebih dahulu penulis menguraikan pengertian sumber daya manusia.

Pengertian sumber daya manusia mengandung dua pengertian :

1. Sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Hal ini berarti sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa.
2. Sumber daya manusia yang mampu bekerja memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu kegiatan tersebut menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dari pengertian diatas menegaskan bahwa sumber daya manusia mempunyai peranan sebagai faktor produksi sebagaimana halnya dengan faktor-faktor produksi yang lain, sumber daya manusia sebagai faktor produksi juga terbatas olehnya itu perlu penempatan sumber daya manusia sebaik-baiknya untuk dapat menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan masyarakat.

Kedua pengertian sumber daya manusia tersebut mengandung aspek kuantitas dalam arti jumlah penduduk mampu bekerja dan aspek kualitas dalam arti jumlah penduduk aspek kualitas dalam arti jumlah penduduk mampu bekerja dan aspek kualitas dalam arti jasa kerja yang tersedia dan dapat diberikan untuk produksi.

Adapun pengertian tentang tenaga kerja dapat dikemukakan : menurut undang-undang Ketenaga Kerjaan No. 14 (1969 :

1) sebagai berikut :

"Tenaga kerja adalah daya manusia untuk melakukan pekerjaan sedangkan pekerjaan adalah kecepatan manusia guna memperoleh pendapatan".

Berdasarkan pengertian diatas, maka diperlukan pembinaan tenaga kerja agar dapat menghasilkan dalam arti meningkatkan kemampuan tenaga kerja agar lebih efektif dalam melakukan pekerjaan, sehingga dengan meningkatnya kemampuan tersebut maka dapat mendorong tenaga kerja untuk berproduksi baik barang maupun jasa.

Kegiatan pembangunan Ekonomi pada hakikatnya kegiatan produksi. Untuk memproduksi dibutuhkan input, atas dasar teknologi tertentu. Keadaan teknologi ini sangat mempengaruhi berapa jumlah tenaga kerja, dalam satuan jam kerja per orang atau jumlah orang yang perlu dippekerjakan. Bagi perusahaan, yang dianggap perlu adalah jumlah yang optimal baginya. Jadi permintaan perusahaan untuk

kegiatan produksinya banyak tergantung atas macam teknologi yang dipakai.

Investasi dikonsepeikan sebagai jumlah pengeluaran yang dipergunakan untuk proses produksi. Pengeluaran ini terdiri dari pembayaran tenaga kerja dan input bukan tenaga kerja. Jadi makin banyak pengeluaran suatu perusahaan makin kuat permintaan terhadap tenaga kerja. Oleh karena permintaan ini dianggap sama dengan kesempatan kerja, maka perubahan kesempatan kerja ditentukan oleh perubahan dari investasi. Masalah kurangnya kesempatan kerja sebagian besar dapat dijelaskan oleh kurangnya kegiatan investasi.

Tenaga kerja sebagai input (faktor produksi) juga adalah manusia, dimana hal ini telah dikategorikan oleh A.S. Munandar (1981), bahwa "Manusia sebagai tenaga kerja, dapat dipandang dari berbagai pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan Mekanikal, menekankan manusia sebagai faktor produksi.
2. Pendekatan Potensialistik, memandang manusia sebagai makhluk yang memerlukan sandang, pangan, papan.
3. Pendekatan hubungan antar manusia, menekankan aspek sosial dan harga diri manusia.
4. Pendekatan Sumberdaya Manusia, memandang manusia sebagai makhluk yang menghendaki perkembangan, mengingini-

kannya makhluk yang berhasrat mengaktualisasikan dirinya.

Tenaga kerja dengan berbagai pendekatan tersebut dapat dijumpai dalam macam-macam usaha termasuk usaha pertanian (dalam hal ini perkebunan), dimana petani adalah tenaga kerja dalam perkebunan.

Petani dalam menjalankan usaha taninya, memegang dua peranan, dia adalah juri-tani (cultivator) dan sekaligus seorang pengelola (Manajer).

Petani yang berfungsi sebagai tenaga kerja termasuk tenaga kerja yang bekerja pada perkebunan, memperoleh balasa jasa berupa upah.

Kalau berbicara mengenai produksi, maka tidak terlepas dari beberapa faktor produksinya. salah satu dari faktor produksi tersebut yaitu tenaga kerja, yang digunakan dalam usaha produksi akan menerima imbalan sebagai upah kerja.

Adapun pengertian dari pada upah adalah harga yang dibayarkan kepada mereka yang memberikan jasa-jasa. Biasanya dibayar per jam, hari, minggu.

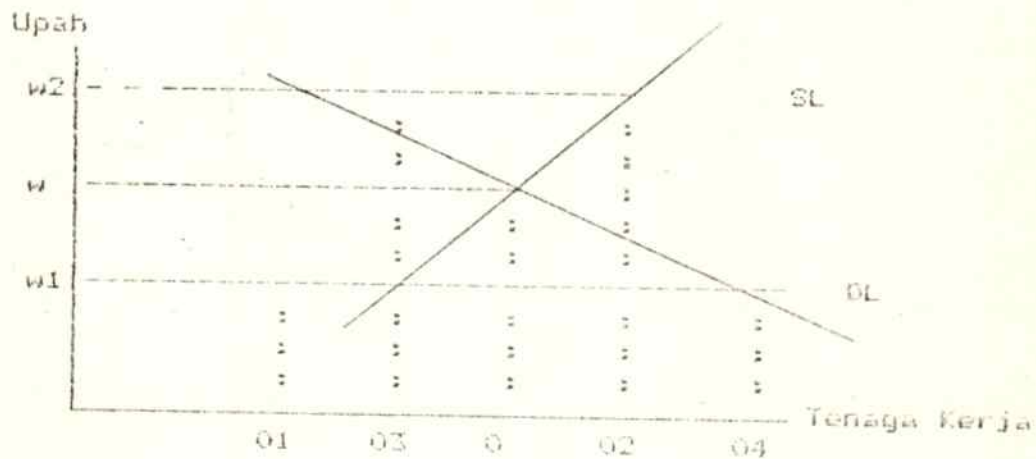
"Dalam ilmu ekonomi semua jenis kompensasi untuk jasa-jasa dinamakan wages".

Berdasarkan pengertian tersebut, maka upah sebagai balasa jasa dapat meningkatkan produksi dan produktivitas kerja buruh.

Adapun penentuan tingkat upah tersebut ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. hal ini dapat dilihat pada kurve berikut ini.

GRAFIK I

HUBUNGAN TINGKAT UPAH DAN TENAGA KERJA



dimana :

SL = Penawaran tenaga kerja

DL = Permintaan tenaga kerja

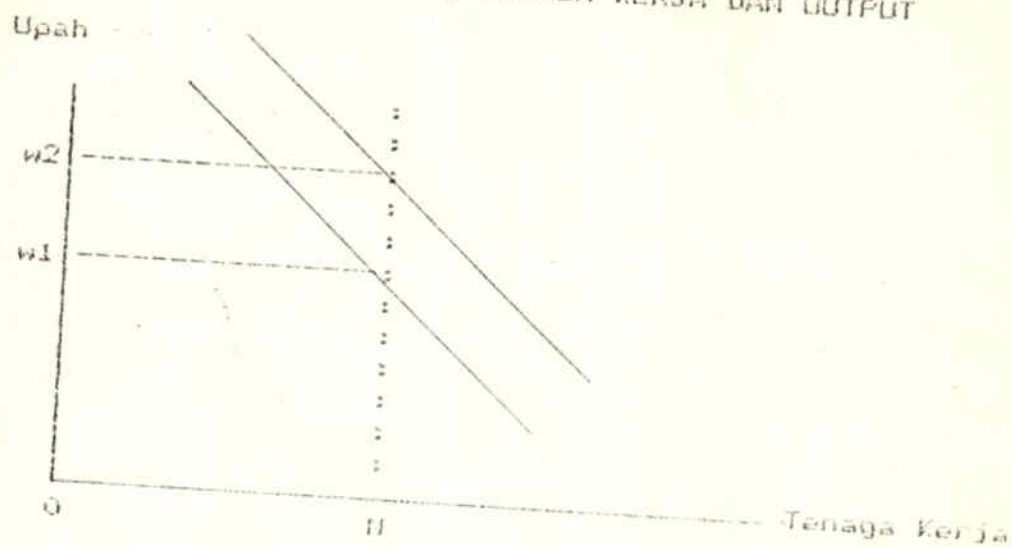
Pada grafik I terlihat perpotongan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja di mana terjadi keseimbangan pada tingkat upah sebesar w , dan jumlah tenaga kerja sebesar 0 . Jika tingkat upah dinaikkan ke w_2 , maka permintaan tenaga kerja yang diminta sebesar 0_4 , sedang penawaran tenaga kerja yang diminta 0_2 , maka berarti terjadi kelebihan permintaan tenaga kerja. Hal ini berarti mendorong tingkat upah naik kembali pada tingkat keseimbangan semula (w). Sebaliknya jika tingkat upah naik ke w_1 maka jumlah

lah tenaga kerja yang diminta sebesar Q_3 , sedang jumlah penawaran sebesar Q_2 , berarti terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja yang menyebabkan tingkat upah turun kembali pada tingkat keseimbangan.

Pada negara-negara yang sudah maju di mana kemajuan pertaniannya diukur dengan tingginya produktivitas tenaga kerja, karena tenaga kerja tersebut terbatas jumlahnya. Hal tersebut berbeda dengan keadaan yang terdapat pada negara berkembang seperti Indonesia, di mana tenaga kerja cukup banyak jumlahnya kecuali tenaga kerja yang mempunyai keterampilan yang masih terbatas jumlahnya. Tenaga kerja yang banyak tersebut tidaklah seimbang dengan faktor-faktor produksi yang ada seperti tanah dan modal. Sehingga terjadi gejala pengangguran yang tidak kentara (Disquised) terutama di pedesaan. Hal ini dapat menyebabkan pemakaian tenaga kerja di pedesaan. Hal ini dapat menyebabkan pemakaian tenaga kerja banyak tetapi ada pemborosan pemakai tenaga kerja jika dibandingkan dengan upah yang diterimanya secara keseluruhan. Hal tersebut dapat merugikan perusahaan, sebab itu jika upah karyawan atau buruh baik (tinggi dalam batas-batas tertentu) akan jauh lebih produktif jika mereka diberi upah yang rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada kurve berikut :

GRAFIK II

HUBUNGAN UPAH, TENAGA KERJA DAN OUTPUT



Keterangan :

w = Upah yang diterima oleh buruh

Y = Hasil

N = Employment (Tenaga Kerja)

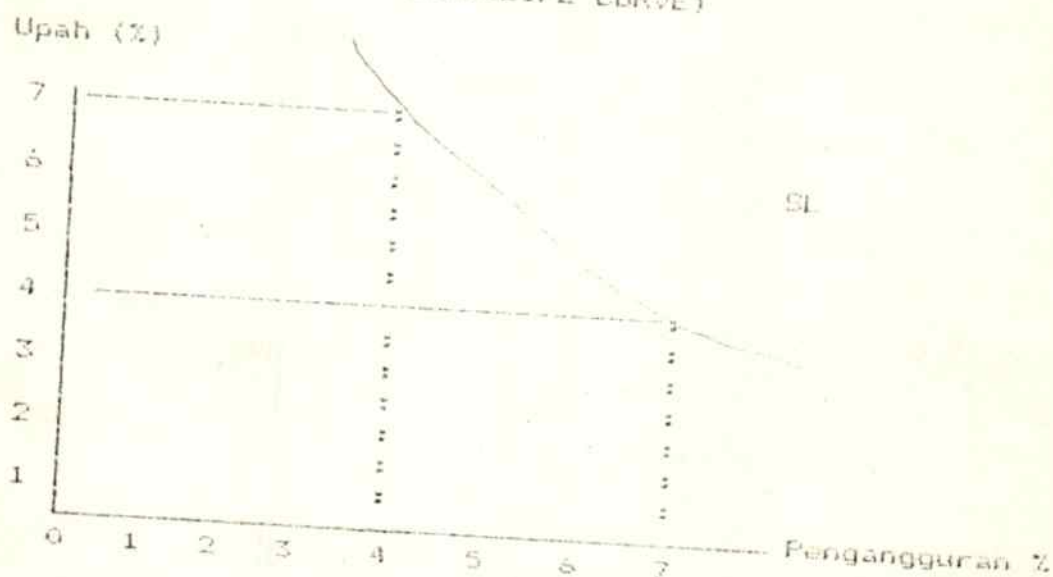
Pada grafik II terlihat bahwa, bila upah diturunkan dari w_1 ke w_2 akan menyebabkan Y_1 akan shift ke bawah pada Y_2 . Dengan kata lain jika terjadi penurunan upah maka terjadi penurunan produksi.

Hal tersebut berlaku kalau diasumsikan bahwa jumlah tenaga kerja adalah tetap. Turunnya produksi tersebut disebabkan oleh berkurangnya hasrat dari para pekerja untuk bekerja lebih produktif dan menyebabkan hasil pekerjaannya tidak memadai.

Produksi yang rendah tersebut ada hubungannya dengan rendahnya upah yang diterima oleh tenaga kerja. Jadi prinsipnya dengan peningkatan upah (dalam batas-batas tertentu) akan dapat ditambah jam kerja produktif para buruh, akan tetapi dalam waktu tertentu walaupun bagaimana tingginya upah yang dibayarkan kepada para buruh mereka tidak akan menambah jam kerjanya atau dia tidak mau bekerja lagi.

Dari segi lain, dapat dilihat hubungan antara tenaga kerja dengan tingkat upah yang dikenal dengan Phillipe Curve yaitu kurve yang memperlihatkan hubungan antara tingkat kenaikan upah yang dapat dilihat pada grafik berikut ini.

GRAFIK III
HUBUNGAN UPAH DAN PENGANGGURAN
(PHILLIPE CURVE)



Dari grafik tersebut, dapat diketahui bahwa :

1. Pada tingkat upah sebesar 4 %, maka tingkat pengangguran yang terjadi sebesar 7 %.
2. Pada tingkat upah sebesar 7 %, maka tingkat pengangguran sebesar 4 %.

Jadi dapat diartikan bahwa jika terjadi kenaikan upah pada suatu perusahaan, maka dapat mengakibatkan turunnya tingkat pengangguran atau dengan kata lain makin banyak orang yang mendapatkan peluang atau kesempatan untuk ikut dalam proses produksi termasuk perkebunan.

2.5 Penyerapan Tenaga Kerja

Permintaan atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan konsumsi terhadap barang dan jasa. Orang membeli barang karena barang itu memberikan nikmat (utility) kepada si pembeli. Akan tetapi pengusaha mempekerjakan seseorang karena seseorang itu membantu memproduksi barang-barang atau jasa untuk dijual kepada masyarakat konsumen. Dengan kata lain, pertambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja, tergantung dari pertambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja, tergantung dari pertambahan permintaan terhadap tenaga kerja, tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksinya.

Meningkatnya, permintaan terhadap produksi hasil perkebunan misalnya akan menimbulkan tambahan permintaan

terhadap karyawan atau tenaga kerja dalam hal penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan hasil produksi, juga secara tidak langsung pengangkutan yang mengangkut produksi perkebunan dan lain-lain.

Pertambahan produktivitas kerja dapat mempengaruhi kesempatan kerja melalui tiga cara disatu pihak peningkatan produktivitas kerja berarti bahwa untuk memproduksi hasil dalam jumlah yang sama diperlukan karyawan lebih sedikit. Sebab itu, bila jumlah hasil produksi tetap sama, sebagian tenaga kerja dapat dilepas. Dipihak lain, peningkatan produktivitas kerja menurunkan biaya produksi per unit barang. dengan turunnya biaya produksi per unit, pengusaha dapat menurunkan harga jual barang dan oleh sebab itu permintaan masyarakat akan barang tersebut bertambah. Pertambahan permintaan akan barang mendorong pertambahan produksi, dan selanjutnya menambah permintaan akan tenaga kerja.

Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar diberbagai sektor seperti sektor pertanian, termasuk didalamnya sektor perkebunan, sektor pertambangan, sektor industri, listrik, bangunan, angkutan dan sektor jasa-jasa. Sektor yang mempekerjakan banyak orang umumnya menghasilkan barang dan jasa yang relatif besar.

Sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar, dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain terhadap pendapatan nasional. Laju pertumbuhan ini mengalami

laju pertumbuhan yang berbeda, demikian juga kemampuan pihak sektor berbeda dalam menyerap tenaga kerja laju pertumbuhan penduduk yang bekerja di sektor pertambangan misalnya mencapai 17,8 % setahun, di sektor bangunan 9,8 %, akan tetapi di sektor pertanian hanya dengan 2,6 % setahun.

Perbedaan laju pertumbuhan tersebut mengakibatkan 2 hal, pertama terdapat perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja masing-masing sektor. Perbedaan laju pertumbuhan kesempatan kerja tersebut juga menunjukkan perbedaan elastisitas masing-masing sektor untuk penyerapan tenaga kerja.

Sacara makro, permintaan akan tenaga kerja dapat diperkirakan dengan mengetahui laju pertumbuhan dan daya serap masing-masing sektor ekonomi, konsep elastisitas kesempatan kerja dapat digunakan untuk menyusun perkiraan kebutuhan tenaga kerja dan menyusun simulasi perumusan kebijaksanaan pembangunan untuk ketenaga kerjaan.

III. METODOLOGI

3.1 Daerah Penelitian

Untuk mendapatkan data dengan permasalahan dan diuraikan dalam pembahasan nantinya maka penelitian ini dilakukan di Daerah Sulawesi Selatan dengan pertimbangannya bahwa daerah ini terdapat banyak perkebunan yang dikelola oleh pemerintah, perkebunan tersebut terbesar di berbagai Daerah Tingkat II yang ada di Sulawesi Selatan.

3.2 Sumber dan Cara Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data

Sumber data dan informasi yang mendukung karya ilmiah ini bersumber dari :

- Kantor Wilayah Departemen Pertanian Sulawesi Selatan
- Kantor Dinas Perkebunan
- Kantor Biro Pusat Statistik Sulawesi Selatan
- Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Sulawesi Selatan
- Dan Sumber-sumber Data Lainnya...

3.2.1 Cara Pengumpulan Data

Data dan informasi yang akan mendukung penulisan ini dikumpulkan dengan mempergunakan metode sebagai berikut ;

- Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung atau dengan cara survei ke lapangan, mengadakan tanya jawab langsung kepada pihak responden yang terdiri dari pejabat yang berwenang dan pengawas teknis perkebunan negara serta pengolahan perkebunan (petani).
- Data sekunder adalah data yang tercatat dalam bentuk laporan dan dikumpulkan oleh penulis dari berbagai kantor serta bahan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam telisan tersebut.

3.3 Peralatan dan Metode Analisis

Dalam pembahasan ini metode analisis yang akan digunakan adalah metode perbandingan yaitu membandingkan jumlah tenaga kerja yang tersertap pada perkebunan negara terhadap jumlah/total tenaga kerja di Sulawesi Selatan, atau untuk melihat kontribusi dari sektor perkebunan tersebut. dengan rumus sebagai berikut :

$$S_j = \frac{Y_j}{Y} \times 100 \%$$

S_j = Proporsi kontribusi sektor perkebunan terhadap penyerapan tenaga kerja

Y_j = Tenaga kerja pada sektor perkebunan

Y = Tenaga kerja secara keseluruhan

3.4 Kerangka Operasional

dalam rangka penelitian dan penulisan ini, dapat dikemukakan kerangka operasional yang digunakan sebagai berikut :

- Proporsi kontribusi sektor perkebunan yaitu untuk melihat berapa besar tenaga kerja yang diserap dari sektor perkebunan negara yang ada disulawesi Selatan, dengan melihat perbandingan secara keseluruhan tenaga kerja yang tersedia, dari tahun ke tahun.
- Tenaga kerja yaitu yang mencakup penduduk yang sudah bekerja makaudnya penduduk yang bekerja pada sektor perkebunan dengan kata lain jumlah tenaga kerja atau banyaknya tenaga kerja yang diserap sektor perkebunan dimana merupakan salah satu faktor produksi untuk menghasilkan produksi dalam proses produksi perkebunan.
- Total tenaga kerja yang ada di sulawesi selatan merupakan keseluruhan tenaga kerja yang ada di Sulawesi selatan, tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah

bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan lain seperti bersahabat dan mengurus rumah tangga.

- Perkebunan negara yaitu merupakan salah satu sub sektor dan sektor pertanian, yang menghasilkan produksi untuk konsumsi dalam negeri juga untuk diekspor, perkebunan negara adalah suatu perkebunan yang dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat yang ada disekitar daerah perkebunan pada khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya.

IV. PERANAN PERKEBUNAN NEGARA DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA

4.1. Perkembangan Perkebunan Negara

Selama kurang lebih dua ribu tahun terakhir masyarakat di kepulauan nusantara secara bertahap telah mengembangkan dua type kegiatan pertanian, yaitu kegiatan pertanian yang menggarap tanaman subsistem dan yang menggarap tanaman perdagangan tanaman subsistem dan yang menggarap tanaman perdagangan (Commercial Crops). Kegiatan pertanian menunjukkan berbagai keanekaragaman, baik dalam segi tanaman, pemilikan tanah, motif ekonomi, kebudayaan, teknologi dan lingkungan yang mempengaruhi pertanian. Dari berbagai ragam kegiatan pertanian itu terdapat empat sistem pertanian yang telah lama dikenal di Daerah Indonesia keempat sistem itu.

1. Sistem perladangan (shifting cultivation) yaitu jenis kegiatan pertanian yang dilakukan secara berpindah-pindah dengan penanaman berbagai tanaman berumur pendek, terutama tanaman pangan.
2. Sistem kebun garden (system) yaitu kegiatan pertanian yang menggarap tanaman (perdu) berusia panjang (perennial) atau tanaman penghasil panen yang ditanam pada lahan tetap.
3. Sistem tegalan (dry field) yaitu type kegiatan penanaman tanaman pangan secara tetap pada daerah lahan kering.

Sistem perladangan secara temporal dan spatial tersebar luas, merupakan sistem pertanian tidak tetap yang asal usulnya dapat dikembalikan pada masa prasejarah. Pada masa kini sistem perladangan lebih banyak dijumpai di daerah tropik, yang didukung oleh tingkat penduduk tertentu, dan dilakukan oleh berbagai macam latar belakang kebudayaan dan tingkat perhubungan teknik.

Sistem perladangan antara lain oleh sifat imitasi ekologis, pertanian tidak tetap, aneka ragam tanaman dan berkaitan dengan kepadatan penduduk yang rendah. Berbeda dengan perladangan, sistem persawahan merupakan bangunan alam sekitar artificial yang secara tetap di tanami dengan tanaman khusus. Persawahan didukung oleh lingkungan pedesaan yang kepadatan penduduknya sangat tinggi, seperti yang terdapat di Jawa.

Ciri lain persawahan memiliki kemampuan untuk menyerap kenaikan jumlah penduduk, juga memiliki kecenderungan untuk merespon kenaikan penduduk melalui intensifikasi. Hal ini berbeda dengan sistem perbedaan corak perkembangan masyarakat masing-masing lingkungan di Indonesia, baik antara masyarakat persawahan dan perladangan.

Seperti halnya dengan sistem perladangan dan persawahan, sistem kebun juga telah ada sejak dahulu menurut para ahli, sistem kebun tanaman tahunan pada lahan tetap,

telah berlangsung di Indonesia berabad-abad lamanya, se-tidak-tidaknya sejak 1200 M selama priode ini terdapat berbagai ragam bentuk. Kadang-kadang kebun ditanami ber-bagai tipe tanaman campuran, seperti tanaman tahunan dan tanaman ramuan masak atau jamu, disamping tanaman keras berumur panjang (perennial Plant) seperti yang terdapat dalam pekarangan. Kadang-kadang kebun lebih diusahakan untuk satu jenis tanaman perdagangan tertentu, seperti pada cengkeh, lada, kopi, karet dan lainnya. Usia kelang-sungan kebun kadang-kadang singkat, barangkali tidak lebih dari 10 tahun, tetapi ada pula yang dapat berusia panjang, yaitu 50 tahun atau lebih. Kebun biasanya padat tanaman, tanaman tinggi, dan memiliki struktur hutan.

Berbeda dengan sawah, kebun kurang menuntut tenaga kerja besar, karen tidak memerlukan pembangunan dan per-meliharaan bangunan irigasi seperti yang diperlukan persawahan. Kebun juga tidak menuntut kebutuhan lokasi yang istimewa, asal iklim dan pengeringan tanahnya cukup baik dan jarak pasar tidak jauh, penanaman tanaman dapat diselenggarakan secara tetap. Dapat terjadi bahwa petani peladang menanam tanaman kebun kedalam lahan peladangan sebagai tambahan produksi subsistemnya, misalnya tanaman lada, kopi, atau karet. Tanaman itu ditanam diladang kemudian ditinggalkannya. ampai tanaman itu berbuah, baru kemudian didatangi kembali untuk memetik hasil panennya.

Sistem kebun yang kurang diurus semacam itu, sudah tentu hasilnya kecil (marginal), dibanding dengan hasil perkebunan.

Untuk mengadakan analisa ekonomi yang berarti, pertanian Indonesia telah kita bagi dua yaitu usaha pertanian rakyat (small holder) dan perusahaan pertanian yang berupa perkebunan. Perusahaan pertanian sebagai lahan pertanian rakyat adalah perusahaan pertanian untuk memproduksi hasil tertentu dengan sistim pertanian seragam di bawah manajemen yang terpusat dengan menggunakan berbagai metode ilmiah dan teknik pengolahan yang efisien.

Di Indonesia perusahaan pertanian yang penting dan sudah mempunyai sejarah yang lama adalah perkebunan (plantation) yang mengusahakan tanah-tanah yang luas berdasarkan hak-hak perusahaan tertentu. Keseluruhan tanah dan bangunan pabrik serta perumahan pegawai, buruh, dan pemimpin perkebunan pada satu tempat tertentu.

Di samping perkebunan, perusahaan-perusahaan pertanian dapat tertentu perusahaan eksploitasi hutan, perusahaan peternakan atau perikanan (laut dan darat) yang kesemuanya mempunyai tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Perusahaan-perusahaan pertanian dalam arti luas ini dapat berstatus perusahaan swasta nasional, join venture atau perusahaan asing tergantung pada pemilik sumber permodalannya.

Perkebunan di Indonesia meliputi luas 2.225.645 hektar pada tahun 1990 dimana sebagian besar adalah milik negara perkebunan-perkebunan milik negara ini terutama merupakan perkebunan-perkebunan bekas modal Belanda yang telah dibeli oleh pemerintah perkebunan di Indonesia bisa dilihat pada tabel 1.

TABEL 1
GAMBARAN PERKEBUNAN NEGARA
DI INDONESIA TAHUN 1990

No	Status Perkebunan	Jumlah	Luas (Ha)	Persentase
1	Perkebunan Negara	343	1.123.492	50,5
2	Perkebunan Swasta Nasional	1.225	773.442	37,7
3	Perkebunan Swasta Asing	34	157.128	7,1
4	Perkebunan Joint Venture	25	91.535	4,1
5	Perkebunan Pemerintah	52	32.470	1,5
6	Perkebunan lain	91	47.358	2,1
	Jumlah	1.901	2.225.645	100

Sumber : Kantor Biro Pusat Statistik Sul-Sel

Dari tabel 11 nampak landasan perkebunan di Indonesia, dari data yang ada perkebunan negara mempunyai areal yang paling luas dengan luas sekitar 1.123.492 hektar atau 50,5% dari luas areal perkebunan yang ada, sedangkan

selebihnya dibagi oleh berbagai perkebunan yaitu perkebunan swasta asing 7,1 %, perkebunana berupa kerjasama atau join venture sebesar 4,1 % perkebunan pemerintah daerah 1,5% dan perkebunan lain-lain sebesar 2,1%.

Dengan demikian dari angka-angka tersebut dapat disimpulkan bahwa perkebunan negara yang ada di Indonesia atau yang dikelola pemerintah adalah separuh dari luas keseluruhan perkebunan dengan melihat hal tersebut maka prospek untuk menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.

4.2. Produksi Perkebunan Negara Di Sulawesi Selatan

Akhir-akhir ini berbagai negara termasuk Indonesia berusaha menggalakkan kegiatan produksi non migas guna penciptaan devisa. Jadi dengan pengembangan sektor perkebunan di Sulawesi Selatan selain merupakan lapangan kerja yang harus mendapat perhatian serius juga merupakan penghasil bahan baku bagi pabrik-pabrik atau Industri di Indonesia pada umumnya dan di Sulawesi Selatan pada khususnya.

Kebijaksanaan peningkatan produksi sektor perkebunan dapat dicapai melalui usaha menjaga daya takar antara produksi sektor perkebunan dan sektor Industri ke arah yang tidak merugikan sektor perkebunan, kenyataan yang tidak banyak dijumpai di negara-negara yang sedang melaksanakan proses Industrialisasi, jadi sektor pertanian

dapat berkembang apabila hasil produksinya dapat terpasarkan yang dalam hal ini terserap sebagai bahan baku bagi industri.

Perkebunan yang diusahakan oleh pemerintah dalam hal ini adalah perkebunan negara yang ada di Sulawesi Selatan yaitu perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PTP XXVIII, perkebunan karet yang dikelola oleh PTP XVII, Perkebunan tebu dikelola oleh PTP XXIV serta perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan milik negara yaitu PTP VI Sulawesi Selatan.

Mengenai lokasi perkebunan negara yaitu tersebar diberbagai daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan antara lain :

1. Perkebunan kelapa sawit (PTP XXVIII) terdapat di Kab. Luwu.
2. Perkebunan Karet (PTP XVII) terdapat di Kab. Mamuju.
3. Perkebunan Tebu (PTP XXIV) terdapat di Kab. Bone dan Takalar.
4. Perkebunan Hibrida (PTP VI) terdapat di Kab. Luwu.
5. Perkebunan Kapas (PTP XXVIII) terdapat di Kab. Takalar.

Kesemua perkebunan negara yang tersebar di Sulawesi Selatan adalah sebagian besar telah berproduksi yaitu

antara lain perkebunan kelapa sawit, kelapa hibrida dan perkebunan tebu untuk lebih jelasnya mengenai produksi dan luas areal perkebunan negara dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2
LUAS AREAL DAN PRODUKSI PERKEBUNAN NEGARA
KELAPA SAWIT (PTP XXVIII) SULAWESI SELATAN
1989 - 1993

No	Tahun	Luas Areal (Ha)	Produksi (ton)	kenaikan (%)
1	1989	7.429	4.649,30	
2	1990	9.000	6.273,89	35,0
3	1991	9.000	18.880,80	200,8
4	1992	9.000	21.278,0	12,69
5	1993	9.000	22.342,0	5,0

Sumber : Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan.

Dari tabel 2 diperlihatkan luas areal perkebunan negara dan produksinya untuk perkebunan kelapa sawit yang ada di Sulawesi Selatan pada tahun 1989 produksinya sebesar 4.649,3 ton dari luas areal sebesar 7.429 Hektar, pada tahun 1990 produksi perkebunan meningkat menjadi 6.273,89 ton juga luas areal perkebunan bertambah luasnya, mengenai kenaikan produk sebesar 35,0% dari tahun sebelumnya dan pada tahun 1991 produksi dari perkebunan

negara menjadi 18.880,80 ton dengan luas 9.000 hektar, kenaikan daripada produksi tersebut adalah sebesar 200%, pada tahun 1992 besarnya produksi dari perkebunan negara untuk kelapa sawit sebesar 21.278, ton dan luas areal sebesar atau seluas 9.000 hektar, kenaikan produksi tersebut hanya sebesar 12,69% dan pada tahun 1993 produksi perkebunan adalah 22.342 dari luas areal 9.000 hektar kenaikannya adalah 5,0 %.

Dengan demikian selama lima tahun kenaikan produk yang terbesar adalah pada tahun 1991 walaupun luas areal tetap sedangkan mengenai besarnya produksi dan luas areal perkebunan negara untuk tanaman tebu yang terletak di Daerah Bone dan Takalar dapat di lihat dalam tabel 3 :

TABEL 3
LUAS AREAL DAN PRODUKSI PERKEBUNAN NEGARA
TANAMAN TEBU (PTP XXIV) SULAWESI SELATAN
1989 - 1993

No	Tahun	Luas Areal (Ha)	Produksi (ton)	Kenaikan (%)
1	1989	14.059	40.786	-
2	1990	14.269	34.184	16,18
3	1991	14.323	45.164	32,12
4	1992	15.882	66.415	47,05
5	1993	16.254	69.835	5,14

Sumber : Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan

Pada tabel 13 diperlihatkan mengenai perkebunan luas dan produksi perkebunan negara dengan tanaman tebu yang di kelolah oleh PTP XXIV, dari data tersebut secara rata-rata produksinya mengalami kenaikan, yaitu tahun 1989 produksinya sebesar 40.786 ton dari luas areal perkebunan 14.059 hektar dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 1990 mengalami penurunan produksi sebesar 16,18 % yaitu produksinya hanya sebesar 34.184 ton dari luas areal yang digunakan seluas 14.269 penurunan ini terjadi karena tanaman yang ditanam terserang hama sehingga produksinya berkurang.

Pada tahun 1991 kembali lagi mengalami peningkatan produksi yaitu sebesar 45.164 ton dari luas areal perkebunan yaitu 14.323 hektar, kenaikan produksinya pada tahun tersebut adalah 32,12 % dan pada tahun 1992 juga mengalami kenaikan produksi dari tahun sebelumnya dengan produksi sebesar 66.415 ton dari luas areal perkebunan 15.882 hektar adapun mengenai kenaikan produksinya adalah sebesar 64.835 ton yang dihasilkan adalah sebesar 16.254 hektar dan juga mengalami kenaikan produksi, kenaikannya adalah 5,14 %.

Sekarang kita akan lihat mengenai luas areal perkebunan dan produksi untuk tanaman kelapa Hibrida yang dikelolah PTP VI sebagai berikut :

TABEL 4
 LUAS AREAL PERKEBUNAN NEGARA TANAMAN
 KELAPA HIBRIDA (PTF VI) SULAWESI SELATAN
 1989 - 1993

No	Tahun	Luas Areal (Ha)	Produksi (ton)	Kenaikan (%)
1	1989	-	-	-
2	1990	-	-	-
3	1991	159	121.239	630,2
4	1992	245	895.350	1,92
5	1993	245	902.410	

Sumber : Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan

Pada tabel 4 nampak bahwa pada tahun 1989 dan tahun 1990 belum ada produksi, nanti pada tahun 1991 perkebunan negara dengan tanaman kelapa hibrida berproduksi yaitu dengan produksi sebesar 121.239 ton dari luas areal perkebunan seluas 159 hektar dan pada tahun berikutnya produksinya meningkat menjadi 895.350 ton dengan luas areal 245 Hektar. Sedangkan pada tahun 1993 banyaknya produksi yang dihasilkan perkebunan negara adalah sebesar 902 410 ton dari luas areal perkebunan negara yang lain. Belum berproduksi jadi masih banyak perkebunan yang ada di daerah-daerah.

4.3. Langkah-langkah Dalam Meningkatkan Produksi Perkebunan Negara

4.3.1. Penyediaan Lahan dan Perluasan Areal

Penyediaan lahan dan perluasan areal oleh perusahaan merupakan tanggung jawab dari perusahaan selaku pengelola, untuk kebun inti pengelolannya ditangani langsung oleh pihak perusahaan dan penyediaan lahannya dilakukan oleh pihak perusahaan, sedang untuk plasma peserta dengan cara mengajukan permohonan kepada pihak perusahaan dengan syarat-syarat :

- a. Alokasi lahan untuk tiap petani peserta ditentukan seluas 2 hektar
- b. Status pemilikan tanah jelas, yang sekurang-kurangnya dibuktikan dengan keterangan lurah dan camat setempat.
- c. Lahan terdapat disekitar unit-unit kebun oleh yang telah ditunjuk / ditentukan oleh pemerintah daerah.

Dalam perluasan areal perkebunan negara terutama dalam peningkatan produksi, maka pihak perusahaan bersama-sama dengan dinas perkebunan dan aparat pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan secara terpadu dan teratur, yang mengarah kepada usaha :

- a. Menyebar luaskan pengertian serta tujuan program perkebunan baik untuk kepentingan rakyat, maupun untuk kepentingan nasional.
- b. Memberikan motivasi pada diri petani sehingga dengan sadar akan mengikuti program perkebunan.
- c. Memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai petani peserta.

4.3.2. Penyuluhan dan Pembinaan Para Petani

Sesuai dengan konsep pertanian umumnya dan subsektor perkebunan khususnya, maka kegiatan transfer teknologi dilakukan dengan kegiatan penyuluhan dan pembinaan para petani kegiatan ini merupakan dengan pihak perusahaan.

Dinas perkebunan melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan melalui unit pelaksanaan proyek yang dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh kepala bidang teknik yang membawahi petugas lapangan proyek terpadu.

Adapun kegiatan penyuluhan yang dilakukan pada pokoknya terbagi dalam dua periode yakni :

- a. Sebelum penanaman suatu tanaman yaitu bersama dengan pendaftaran petani yang akan menjadi peserta. Tujuan dari penyuluhan tersebut adalah untuk meniadakan kesadaran petani agar mau menjadi peserta.

b. Diadakan pada waktu pembangunan yaitu mulai dari persiapan sampai pada pelaksanaannya pada periode ke dua ini petani peserta diharuskan bekerja pada perkebunan tersebut sebagai karyawan yang diupah dan menambah pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan aspek teknik dilapangan.

Tujuan dari penyuluhan tersebut adalah untuk menambah pengetahuan atau meningkatkan keterampilan para petani dalam mengelolah usaha taninya, terutama yang berhubungan dengan tanaman seperti : cara pemupukan yang lebih baik, pemberantasan hama dan penyakit serta teknik pemertanian hasil, sudah tentu jika hal ini dilakukan dapat meningkatkan hasil perkebunan negara.

4.4. Perkembangan Angkatan Kerja di Sulawesi Selatan.

Potensi penduduk pada dasarnya ikut menentukan tersedianya tenaga kerja yang dapat diserap disektor pertanian. Khususnya sub sektor perkebunan, untuk itu pengkajian potensi penduduk dipandang perlu terutama dalam hubungannya dengan lapangan kerja.

Penduduk Sulawesi Selatan cukup besar sedang tingkat hidupnya masih relatif rendah, dilain pihak, kekayaan sumber alam menunjukkan potensi yang menggembirakan untuk meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat daerah ini, jumlah penduduk yang besar mencerminkan dua hal. Pertama,

Jumlah penduduk yang besar menggambarkan kebutuhan masyarakat yang besar seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan, energi dan kesempatan kerja, kedua jumlah penduduk yang besar mencerminkan potensi yang dapat dikerahkan untuk mengolah sumber-sumber alam yang tersedia untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

Besarnya penyediaan atau supply tenaga kerja dalam masyarakat adalah jumlah orang yang menawarkan jasanya untuk proses produksi. Diantara mereka sebagian sudah aktif dalam kegiatannya yang menghasilkan barang atau jasa, mereka dinamakan golongan yang bekerja atau employed persons, sebagian lagi tergolong siap bekerja dan sedang berusaha mencari kerja atau penganggur, jumlah yang bekerja dan pencari kerja dinamakan angkatan kerja.

Jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan atau demand dalam masyarakat. Permintaan tersebut dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi dan tingkat upah.

Berikut ini akan diperlihatkan perkembangan angkatan kerja yang ada di Sulawesi Selatan selama lima tahun dari tahun 1989 sampai tahun 1993

TABEL 3
 PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA
 SULAWESI SELATAN TAHUN 1989 - 1993

No	Tahun	Bekerja	Mencari Pekerjaan	Angkatan Kerja
1	1989	2.303.669	64.543	2.368.212
2	1990	2.387.749	58.254	2.446.003
3	1991	2.536.736	62.132	2.618.888
4	1992	2.512.773	67.367	2.580.140
5	1993	2.531.532	94.338	2.625.870

Sumber : Kantor Biro Pusat Statistik Sulawesi Selatan.

Pada tahun 1992 besarnya angkatan kerja yang terdapat di Sulawesi Selatan yaitu sekitar 2.580.140 orang, dilihat dari angka tersebut maka angkatan kerja tahun tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dengan perincian sebagai berikut, yang telah bekerja adalah sebesar 2.512.773 orang sedangkan yang mencari pekerjaan adalah 67.367 orang angkatan kerja Sulawesi Selatan.

Pada tahun 1993 angkatan kerja di Sulawesi Selatan adalah 2.625.870 orang pada tahun tersebut juga mengalami peningkatan yaitu kenaikannya 1,7 % dengan perincian terdiri dari yang sudah bekerja sebanyak 2.531.532 orang dan yang belum bekerja atau yang mencari pekerjaan adalah

sebesar 94.338 orang, dilihat dari prosentase yang bekerja dari seluruh angkatan kerja adalah sebesar 96,41 %.

Sedangkan kesempatan kerja cukup besar khususnya sektor pertanian, lapangan pekerjaan penduduk Sulawesi Selatan sektor pertanian menghampiri 40 % pada tahun 1993 dibanding tahun sebelumnya mengalami penurunan.

Menurutnya peranan kesempatan kerja disektor pertanian dan naiknya peranan disektor lain seiring dengan tujuan pembangunan untuk lebih meningkatkan industrialisasi dan lebih mempermoderen pengusaha pertanian. Sektor-sektor yang terlihat nyata kenaikannya adalah sektor industri, bangunan, perdagangan dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut :

TABEL 6
PERKEMBANGAN KESEMPATAN KERJA MENURUT
LAPANGAN PEKERJAAN (PERSEN)

No	Lapangan Pekerjaan	1992	1993
1	Pertanian	40,21	39,53
2	Industri	14,13	14,57
3	Bangunan	5,41	5,73
4	Perdagangan	19,59	10,95
5	Jasa-jasa	15,10	15,03
6	Lainnya	5,54	5,32

Sumber : Kantor Biro Pusat Statistik Sulawesi Selatan

Melihat tabel 6 tersebut diatas nampak bahwa pertumbuhan yang mengalami peningkatan disektor Industri adalah di peranannya 14,13 % pada tahun 1992 menjadi 14,57 % pada tahun 1993, dan sektor Rangunan juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 1992 peranannya atau kesempatan kerja pada sektor tersebut adalah 5,41 % dan mengalami peningkatan pada tahun 1993 yaitu 5,73 %. Serta sektor perdagangan mengalami peningkatan dalam hal ini adalah peranannya atau banyaknya tenaga kerja yang ter-serap pada sektor ini yaitu pada tahun 1992 sebesar 19,59 % meningkat pada tahun 1993 menjadi 19,95 %.

Pola perkembangan komposisi penduduk yang bekerja seperti diatas secara umum merupakan salah satu ciri daerah berkembang yang sedang membangun, sektor-sektor tertentu seperti diuraikan diatas mempunyai perkembangan yang baik hal ini karena terbukanya sektor tersebut dan sangat baik untuk menerima pekerja karena sifatnya yang mandiri dan informal .

Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui usaha-usaha pendidikan dan latihan-latihan akan turut menentukan keberhasilan kegiatan usahanya, dimana produktifitas faktor-faktor lain sangat tergantung pada kemampuan tenaga kerja yang memanfaatkannya oleh itu peningkatan kualitas tenaga kerja seyogyanya ditingkatkan, sehingga tujuan usaha kegiatan perkebuana tercapai sebagaimana

hasil wawancara dengan pihak yang menjadi masalah adalah masih rendahnya tingkat kualitas tenaga kerja yang ada demikian juga rendahnya kesadaran dari pada tenaga kerja itu sendiri. Kegiatan yang demikian itu tentunya akan mempengaruhi usaha kegiatan perkebunan dalam memproduksi-nya.

4.5 Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Perkebunan Negara

Peningkatan produksi perkebunan negara yang dikelola pemerintah tidak terlepas dari pemakaian tenaga kerja, penanaman perkebunan di daerah ini dikerjakan secara intensif, mulai dari penggarapan tanah sampai pemetikan hasil umumnya dilakukan dengan mempergunakan tenaga manusia.

Selain itu, untuk tanaman dan pekerjaan pemeliharaan seperti menyang, membersihkan dan membuang daun-daun kering, menjaga kebun dari kerobohan sampai dengan pemetikan hasil dan mengangkat sampai transport juga memerlukan banyak tenaga kerja manusia.

Tenaga kerja manusia merupakan faktor produksi cukup penting, karena meskipun faktor produksi lain seperti modal, tanah, dan sumber daya telah tersedia tanpa tenaga kerja, maka proses produksi tidak akan terlaksana, tenaga kerja harian atas penebangan atau pemetikan, penanaman dan pemeliharaan yang sifatnya temporer, mereka hanya dibutuhkan pada saat musim giling dan tanam.

Perlu pula diketengahkan bahwa tenaga kerja pada perusahaan perkebunan ini umumnya berasal dari petani yang senang tiasa memperlihatkan usahatani padinya dengan mengolah langsung sawahnya pada musim tertentu. Hal ini berarti bahwa tenaga kerja perkebunan masih tetap mempunyai loyalitas/dedikasi terhadap produksi pada/beras. Sebagai usaha turun temurun di Sulawesi Selatan sebagai kembang beras di Indonesia, walaupun para petani bersangkutan secara relatif lebih beruntung (berupa pendapatan rumah tangga) sebagai tenaga kerja perkebunan dibanding pendapatan bersumber dari usaha tani padinya.

Kegiatan produksi tidak terlepas dari beberapa faktor produksi termasuk tenaga kerja dimana tenaga kerja menerima imbalan berupa upah. Upah adalah harga yang dibayar untuk mereka yang memberikan jasa yang biasanya dibayar perjam, hari, atau minggu bahkan bulan. Upah ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja seorang pekerja.

Berdasarkan hasil penelitian dengan tenaga kerja pada perusahaan perkebunan, ternyata bahwa bukan faktor upah saja (faktor ekonomi) yang menjadi pendorong bagi penduduk untuk bekerja pada perkebunan, tetapi juga faktor-faktor non ekonomis.

Ternyata terdapat dikalangan karyawan (tenaga kerja) yang bekerja pada perusahaan ini karena dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Keinginan untuk mengabdikan pada negara dan bangsa.
2. Karena merasa bangga dengan adanya perkebunan negara di Sulawesi Selatan, dalam hal ini membangun daerah sendiri.
3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan produksi perkebunan.

Mengenai kesejahteraan dan kesehatan keluarga ternyata mengalami perbaikan /peningkatan setelah mereka bekerja pada perusahaan perkebunan. Selain itu, diperoleh pula informasi dari para karyawan bahwa dikalangan mereka ada yang bertambah kemampuannya untuk membiayai pendidikan anaknya karena adanya pendapatan berupa upah dari perusahaan perkebunan.

Sehubungan dengan itu ada tiga faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja antara lain :

1. Yang mengandung kualitas dan kemampuan fisik dari tenaga kerja itu. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, latihan, motivasi kerja, mental dan kemampuan fisik tenaga kerja yang bersangkutan.
2. Sarana pendukung, dalam hal ini dibagi atas dua :
 - Menyangkut lingkungan kerja, termasuk teknologi dan cara produksi, saran dan peralatan produksi yang

digunakan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri.

- Menyangkut kesejahteraan tenaga kerja yang tercantum dalam sistem pengupahan dan jaminan sosial serta jaminan kelangsungan kerja.

3. Supra sarana, dimana aktifitas yang terjadi didalam, perusahaan itu dipengaruhi oleh apa yang terjadi diluarnya, seperti faktor-faktor produksi yang digunakan prospek pemasaran, perpajakan, perincian dan lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut, maka peningkatan produktivitas tenaga kerja merupakan suatu usaha-usaha dalam rangka menentukan hasil-hasil kegiatan perusahaan perkebunan.

Demikian juga manusia sebagai tenaga kerja dapat menciptakan dorongan untuk mengembangkan teknologi, jadi pertambahan penduduk merupakan salah satu faktor penting yang menimbulkan teknologi pertanian di negara-negara maju sejak beberapa abad yang lalu, perkembangan penduduk yang bertambah cepat bersama-sama dengan perbaikan dalam jaringan pengangkutan dan penambahan dalam tingkat pendapatan sehingga ia memperluas hasil-hasil produksi.

Maka nyata bagi kita bahwa sebagian besar tenaga kerja dapat memperluas dan mempercepat pengembangan teknologi dari suatu hasil produksi pada berbagai bentuk

atau jenis pekerjaan yang diperlukan manusia, meliputi pertanian, industri, dan jasa lain pihak. Demikian juga jumlah tenaga kerja di daerah kita cukup banyak, maka dengan adanya perkebunan negara, jumlah tenaga kerja yang terserap cukup besar. Lebih lanjut penulis menyajikan jumlah tenaga kerja yang terserap pada perusahaan negara dalam tabel 7.

Pada tabel tersebut di perlihatkan bahwa pada tahun 1989 jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor perkebunan negara adalah sebesar 4.388 orang dan pada perusahaan perkebunan tebu yang paling banyak yaitu 3.853 orang, banyaknya tenaga kerja yang diserap pada perkebunan tebu mengingat perkebunan tersebut memiliki areal yang sangat luas yang tersebar di dua daerah kabupaten yaitu Kabupaten Bone dan Takalar.

TABEL 7
 JUMLAH TENAGA KERJA YANG TERSERAP
 PADA PERKEBUNAN NEGARA DI DAERAH
 SULAWESI SELATAN TAHUN 1989-1993

No	Tahun	Jumlah Tenaga Kerja (orang)					Jumlah
		P.K.sawit	P.Tebu	P.Karet	P.K.Hibrida	P.Kapas	
1	1989	265	3.853	174	-	96	4.388
2	1990	295	4.044	163	-	107	4.609
3	1991	276	4.208	181	126	123	4.914
4	1992	321	4.244	194	109	148	5.016
5	1993	340	4.401	209	139	150	5.238

Sumber : Kanwil Departemen Tenaga Kerja Propensi Sulawesi Selatan.

Pada tahun 1990 jumlah tenaga kerja yang dapat terserap pada perkebunan negara adalah sebesar 4.609 orang, pada tahun 1991 jumlah tenaga kerja yang tersalur dalam kegiatan perkebunan yang dikelola pemerintah besarnya adalah sebesar 4.914 orang, dan pada tahun tersebut perkebunan kelapa hibrida telah menerima tenaga kerja sebesar 126 orang, perkebunan karet 181 orang, perkebunan kelapa sawit 276 orang, perkebunan tebu tenaga kerja yang diterima adalah 4.208 orang atau 85,6 % diserap dari sektor tersebut, pada tahun 1992 jumlah tenaga kerja terserap adalah 5.016 orang, dimana sektor perkebu-

nan kelapa sawit sebesar 321 orang atau 6,39 %, perkebunan tebu adalah 4.244 orang atau 84,6 %, sektor perkebunan karet tenaga kerja terserap adalah 194 orang atau 3,86 %, perkebunan kelapa hibrida tenaga kerja yang terserap adalah 109 orang atau 2,1% dan perkebunan kapas tenaga kerja yang terserap adalah sebesar 148 orang atau 2,94 % dari seluruh tenaga kerja yang terserap pada perkebunan negara untuk tahun ini.

Pada tahun 1993 jumlah tenaga kerja yang terserap secara keseluruhannya dari tahun tersebut adalah 5.238 orang dengan perincian sebagai berikut perkebunan kelapa sawit sebesar 340 orang, atau 6,49 %, perkebunan tebu sebesar 4.401 orang dalam prosentase adalah 84,0 %, perkebunan karet sebesar 209 orang, atau 3,99% perkebunan kelapa hibrida diserap tenaga kerja sebesar 139 orang atau 2,65 % dan perkebunan kapas sebesar 150 orang tenaga kerja yang terserap atau 2,86 %.

Jadi dari hasil data tersebut dapat disimpulkan mengenai perkebunan yang paling banyak menyerap tenaga kerja, dari keseluruhan perkebunan yang dikelola pemerintah maka perkebunan tebu menyerap ipaling banyak tenaga kerja.

Sekarang akan kita lihat besarnya peranan sektor perkebunan negara terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan yaitu dengan menghitung besarnya kontri-

busi dari pada perkebunan tersebut terhadap angkatan kerja secara keseluruhan yang ada di Sulawesi Selatan, atau membandingkan antara tenaga kerja yang terserap pada perkebunan negara dengan keseluruhan angkatan kerja perhitungannya sebagai berikut :

Tahun 1989

$$= \frac{4.388}{2.368.212} \times 100 \% = 0,18 \%$$

Tahun 1990

$$= \frac{4.609}{2.446.003} \times 100 \% = 0,19 \%$$

Tahun 1991

$$= \frac{4.914}{2.618.888} \times 100 \% = 0,18 \%$$

Tahun 1992

$$= \frac{5.016}{2.580.140} \times 100 \% = 0,19 \%$$

Tahun 1993

$$= \frac{5.238}{2.625.870} \times 100 \% = 0,20 \%$$

Dari hasil perhitungan didapat hasil bahwa pada tahun 1989 besarnya kontribusi dari sektor perkebunan negara terhadap penyerapan tenaga kerja yang ada di Sulawesi Selatan atau angkatan kerja yaitu dalam prosentase adalah sebesar 0,18 %, pada tahun 1990 meningkat

menjadi 0,19 %, pada tahun 1991 kontribusi dari insektor perkebunan terhadap angkatan kerja adalah 0,18 %, dan tahun 1992 sumbangannya dari perkebunan negara dalam bentuk penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 0,19 % serta tahun 1993 adapun peranan dari perkebunan negara yang tersebar didaerah-daerah dalam menyerap tenaga kerja adalah sebesar 0,20 %.

Dari hasil-hasil tersebut diatas secara keseluruhan rata-rata daripada kontribusi sektor perkebunan negara dalam penyerapan tenaga kerja prosentasinya adalah 0,19 %, kalau dilihat dari angka-angka tersebut nampak kecil sekali namun kenyataan bahwa peranan sektor perkebunan negara dalam penyerapan tenaga kerja yang ada di Sulawesi Selatan adalah cukup besar, dan ini menunjukkan bahwa keberadaan dari perkebunan negara cukup besar terhadap perekonomian negara pada umumnya dan perekonomian daerah pada khususnya, karena dapat membantu pemerintah dalam hal penyediaan lapangan kerja atau penyerapan tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran yang semakin membengkak dari tahun ke tahun.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Selapan kesimpulan mengenai peranan perkebunan negara dalam menyerap tenaga kerja :

1. Bahwa ada alasan-alasan yang mendukung pentingnya peningkatan produksi perkebunan, antara lain adanya kemudahan dalam mendapatkan bahan mentah, menunjang terciptanya integrasi kegiatan pada sektor ekonomi lain, menciptakan kesempatan kerja bagi pengangguran dan sebagai basis suatu kemandirian ekonomi.
2. Ditinjau dari segi peningkatan produksi perkebunan negara di Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan untuk tanaman kelapa sawit rata-rata produksi setiap tahun adalah 14.835,79 ton dan produksi tanaman tebu rata-rata produksi setiap tahun adalah 51.274,3 ton serta produksi tanaman kelapa hibrida adalah produksinya setiap tahun 434.333 ton.
3. Ditinjau dari segi tenaga kerja yang diserap pada perkebunan negara dari tahun 1989 sampai tahun 1993 juga mengalami peningkatan yang berarti dapat dilihat pada tahun 1989 jumlah yang terserap sebanyak 4.338 orang dan lima tahun kemudian mengalami peningkatan yaitu menjadi 5.238 orang tenaga kerja atau dengan kata lain kontribusi daripada sektor perkebunan terhadap penyerapan tenaga kerja yang ada di Sulawesi

Selatan yaitu secara rata-rata selama lima tahun adalah 0,19 %, dan ini menunjukkan bahwa dengan adanya perkebunan negara tersebut dapat membantu pemerintah dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan.

5.2. Saran

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan sehubungan peranan perkebunan negara dalam penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan antara lain :

1. Dalam usaha peningkatan produksi tahun-tahun berikutnya hiranya pemakaian tenaga kerja diusahakan lebih efisien dan lebih efektif, agar produksi yang dihasilkan minimal sesuai dengan target yang diinginkan.
2. Diharapkan bahwa dalam usaha peningkatan produksi perkebunan negara karena faktor tenaga kerja memiliki pengaruh yang berarti, maka pembinaan untuk selanjutnya agar berarti lebih ditingkatkan.
3. Diharapkan juga pada tahun-tahun yang akan datang agar lebih banyak membuka perkebunan negara, khususnya yang menghasilkan produk untuk ekspor, mengingat daerah di Sulawesi Selatan masih mempunyai lahan yang luas yang belum dimanfaatkan, yang nantinya apabila proyek tersebut berjalan dengan baik akan lebih banyak lagi tenaga kerja yang terserap.

DAFTAR PUSTAKA

1. Adisewojo, R. Sodo. 1983. Bercocok Tanam Tebu. Sumur Bandung.
2. Ramwidjojo, Moelyadi. 1983. Pembangunan Pertanian - Usaha Nasional, Surabaya.
3. Chayono, Bambang Tri. 1980. Kebijakan dan Pertanian. Andi Offset, Edisi pertama, Yogyakarta.
4. Djohadikusumo, Sumitro. 1980. Ekonomi Pembangunan, Jakarta.
5. Kamaluddin, Rus. 1983. Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Daerah. Ghalia Indonesia, Jakarta.
6. Mosher. AT, 1982. Menggerakkan dan Membangun Pertanian. CV. Yaguna, Jakarta.
7. Mulyarto, 1979. Pengantar Ekonomi Pertanian LPSES. Jakarta.
8. Simanjuntak. J. Payaman, 1985. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Fakultas Ekonomi UI. Jakarta.
9. Surat, 1986. Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja. Gajah Mada Universitas Press, Jakarta.
10. Tohir Maslan. A, 1975. Pengantar Ekonomi Pertanian. Cetakan Ketiga, Bandung.